



# ANALISIS PENGARUH INVESTASI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2021

Alfandiary Raihan Nurichsan • Eni Setyowati

**Abstract.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan cross-section meliputi 35 kabupaten dan 8 kota. Sedangkan data time-series dimulai dari tahun 2019-2021. Variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten dan Belanja Pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa model terestimasi Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai hasil estimasi terbaik. Upah Minimum Kabupaten memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Sementara, Indeks Pembangunan Manusia, Investasi dan Belanja Pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019-2021.

**Keywords:** *Tenaga Kerja; Investasi; IPM; UMK; Belanja Pemerintah.*

©2022 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada seluruh masyarakat, termasuk dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah sehingga struktur perekonomian seimbang (Ramlawati, 2020). Namun, pembangunan ekonomi di Indonesia dewasa ini masih dihadapi oleh masalah klasik, yaitu pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang sangat besar setiap tahun tentu berdampak pada bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan masalah ketenagakerjaan juga akan bertambah (Basriwijaya & Maryoni, 2015).

Menurut Disnakertras Sumut (2020) Jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara yang dirumahkan dan di-PHK mencapai 14.000 yang tersebar di 283 Perusahaan.

Alfandiary Raihan Nurichsan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [Alfanndiaryy@gmail.com](mailto:Alfanndiaryy@gmail.com)

Eni Setyowati

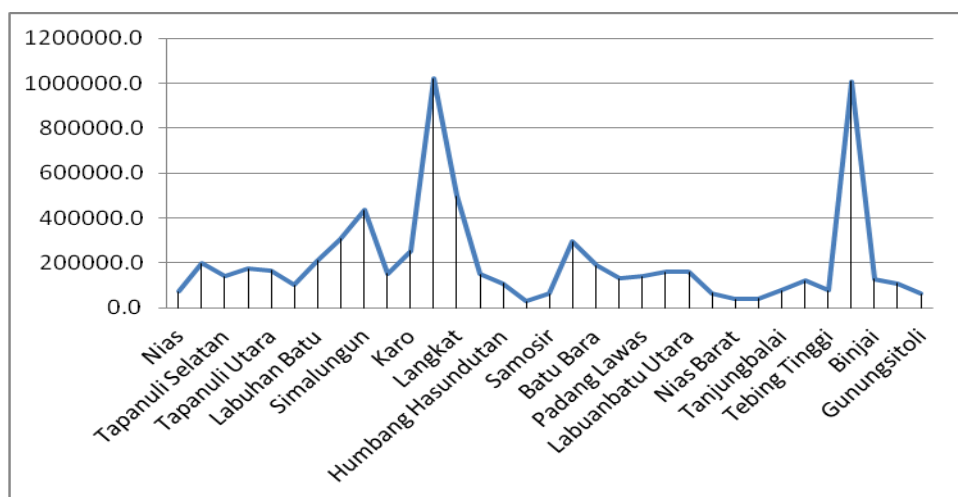
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [es241@ums.ac.id](mailto:es241@ums.ac.id)

yang bergerak di bidang Pariwisata paling terkena dampak oleh Covid-19 seperti perhotelan, biro-biro perjalanan dan usaha ritel seperti Plaza yang sesuai aturan Pemerintah bahwa Plaza-Plaza harus ditutup untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Masalah lainnya adalah soal pekerja anak di bawah umur. Sesuai regulasi pekerja anak di bawah umur (14-16) tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam, tetapi upahnya dikatakan harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun di suatu daerah, dengan maksud bahwa penyerapan tenaga kerja di daerah mendukung keberhasilan pembangunan secara nasional. Grafik 1.1 memperlihatkan rata-rata perkembangan penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019-2021.

**Grafik 1.1 Rata-Rata Perkembangan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021 (jiwa)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Berdasarkan Grafik 1.1 penyerapan tenaga kerja di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara terlihat berbeda-beda. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 1021168,7 jiwa. Sementara rata-rata penyerapan tenaga kerja selama periode 2019-2021 terendah terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 28632,7 jiwa.

Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Dalam penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga rata-rata tingkat upah pekerja dapat meningkat (Putri & Soelistyo, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Nofrita & Marwan (2022) dan Ningrum & Nurhayati (2021) menemukan bahwa upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara Istiyani et al., (2022) menemukan hal yang sama bahwa upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya faktor investasi secara langsung dapat meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan meningkatkan permintaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh investasi yang terealisasi baik dalam rangka PMDN maupun PMA. Diharapkan dengan meningkatnya investasi akan mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan



ekonomi diharapkan dapat memperluas lapangan kerja (Ali et al., 2020).

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan investasi dan penyerapan tenaga kerja, seperti yang diteliti oleh Romdhoni (2017) dengan menggunakan analisis OLS (*Ordinary Least Square*) menemukan bahwa antara variabel investasi dengan variabel penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif. Temuan penelitian yang sama ditemukan oleh Wasilaputri (2016) dan Aisyah & Fitriana (2019) bahwa investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia berfungsi untuk mengukur capaian dari pembangunan manusia yang berdasarkan komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang. Komponen dasar dari Indeks Pembangunan Manusia itu mencakup keterampilan dan kesehatan. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Semakin tingginya kualitas hidup manusia maka akan menunjang peningkatan produktivitas barang dan jasa yang akan dihasilkan, dengan begitu semakin tinggi IPM akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Hafiz & Haryatiningsih (2021) dan Aisyah & Nur (2020) menemukan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara, Putri et al., (2022) menemukan hal yang sama bahwa IPM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Belanja pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena belanja pemerintah akan menjadi sumber penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat maka akan mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan input produksi salah satunya adalah tenaga kerja sehingga dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Ziyadaturrofiqoh et al., 2018). Dalam penelitiannya, Alisman (2018) menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Palupy & Purnomo (2018) menemukan hal yang sama bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa, di negara berkembang seperti Indonesia, salah satu masalah utama dari sisi ketenagakerjaan adalah masih banyaknya pengangguran. Pesatnya perkembangan, jumlah penduduk mengakibatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia menjadi kurang maksimal, sehingga, lapangan pekerjaan, semakin terbatas yang akan mengakibatkan pengangguran di banyak daerah, terutama di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, IPM setiap tahunnya mengalami peningkatan, idealnya, peningkatan IPM, akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia atau akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun pada kenyataannya, peningkatan IPM di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tidak diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tajam. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat juga bisa menjadi evaluasi apakah anggaran yang dikeluarkan sudah tepat sasaran untuk meningkatkan pembangunan nasional lewat peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan, penelitian untuk, mengetahui bagaimana arah dan besarnya pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten/kota dan belanja pemerintah terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021.

## LANDASAN TEORI



### **Definisi Tenaga Kerja**

Menurut BPS (2021) tenaga kerja adalah setiap orang, laki-laki maupun wanita, yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan, baik luar maupun dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja.

Menurut Purwaningsih (2017), tenaga kerja merupakan salah satu input utama dalam usaha. Tenaga kerja manusia, ternak, dan mekanik atau mesin adalah tiga jenis tenaga kerja. Baik di dalam keluarga atau di luar, tenaga kerja dapat diperoleh. Pekerja laki-laki, pekerja perempuan, dan pekerja anak. Di bawah usia 14 tahun, anak-anak tidak diperbolehkan bekerja.

### **Definisi Investasi**

Investasi adalah penanaman modal berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Teori ekonomi mengartikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi yang berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Hasani, 2022).

Menurut Harrod Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Saputri, 2017).

### **Definisi Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut *United Nation Development* (UNDP) yang dikenalkan oleh Amartya Sen dan Mahbub UL Haq pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala yang ditunjukkan dengan adanya laporan tahunan *Human Development Report*. Dengan tujuan untuk menekankan bahwa pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimiliki dalam pembangunan manusia. *Human Development Indeks* dengan kata lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu cara untuk mengukur perkembangan dalam pembangunan manusia. IPM memberikan suatu pencapaian pembangunan yang lebih baik karena tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, tetapi juga mencakup berbagai bidang seperti dalam kebahagiaan, kesehatan, dan adanya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas. Angka yang ada dalam IPM merupakan gabungan dari 3 (tiga) dimensi utama antara lain umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dalam bidang pendidikan diukur dengan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Standar Hidup Layak yang dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Pendapatan Perkapita (Dartanto, 2020).

Menurut Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi kualitas manusia, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan



produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi (Todaro & Smith, 2015).

### Definisi Upah Minimum Kabupaten

Perubahan upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Bagi perusahaan, upah merupakan biaya produksi sehingga pengusaha akan meminimalkan biaya produksi, yaitu upah untuk mencapai keuntungan yang optimal. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Apabila harga produk naik, konsumen akan mengurangi konsumsi atau membuat permintaan terhadap produk tersebut berkurang. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya, dengan asumsi perusahaan menggunakan teknologi padat karya (*labor intensive*). Turunnya target produksi perusahaan memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Ketika upah minimum dari tenaga kerja tersebut lebih tinggi daripada tingkat upah keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja tersebut oleh pengusaha akan cenderung turun yang berarti kesempatan kerja juga mengalami penurunan. Sebaliknya jika upah minimum dari tenaga kerja tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat upah keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja oleh pengusaha dan kesempatan kerja akan meningkat (Lastiko, 2019).

### Definisi Belanja Pemerintah

Pemerintah cenderung menggunakan kebijakan fiskal ketika kekuatan pasar dianggap tidak mampu untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal tersebut antara lain berbentuk belanja negara (Hidayat & Nalle, 2017).

Intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengalokasikan belanja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan belanja pemerintah diyakini oleh Keynes akan menstimulus output dalam suatu sistem ekonomi. Belanja pemerintah menjadi salah satu variabel eksogen yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang bertambah lebih dari dua juta orang setiap tahun (Tasmilah, 2021).

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan model *Ordinary Least Square* (OLS).

$$\log(TK)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log(INV)_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 \log(UMK)_{it} + \beta_4 \log(BP)_{it} + \varepsilon_t \quad (1)$$

di mana :

TK	= Tenaga Kerja (jiwa)
INV	= Investasi (Miliar Rupiah)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (%)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)
BP	= Belanja Pemerintah (Ribuan Rupiah)



$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
$t$	= Periode Waktu
$I$	= Kabupaten/Kota
$\varepsilon_t$	= <i>Error Term</i>
Log	= logaritma natural

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan *Pooled Ordinary Least Squares (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* dapat dilihat pada Tabel 1.

Uji Chow dan uji Hausman akan dipakai untuk memilih model terestimasi terbaik – *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)*. Apabila ternyata pada Uji Chow terpilih *Pooled Least Square (PLS)* dan pada uji Hausman terpilih *Random Effect Model (REM)*, maka harus dilakukan uji tambahan, yakni uji *Langrange Multiplier (LM)* untuk memilih model terestimasi terbaik antara *Pooled Least Square (PLS)* dan *Random Effect Model (REM)*.

**Tabel 1**  
**Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross section**

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	-611033,8	-406146,0	-982655,9
INV	-0,000160	9,06E-06	-5,13E-06
IPM	3876,993	7690,946	13996,56
UMK	0,074532	0,026952	0,041019
BP	0,000265	-2,24E-06	6,79E-05
$R^2$	0,936172	0,999121	0,388679
<i>Adjusted. R<sup>2</sup></i>	0,933455	0,998610	0,362665
Statistik $F$	344,6746	4,59E+09	14,94135
Prob. Statistik $F$	0,000000	-1014,231	0,000000

### Uji Pemilihan Model

#### (1) Chow

Cross- Section  $F(32,62) = 138,689239$ ; Prob.  $F(32,62) = 0,0000$

#### (2) Hausman

Cross-Section random  $\chi^2(4) = 431,045849$ ; Prob.  $\chi^2 = 0,0000$

**Sumber:** Eviews, diolah.

Uji Chow dipakai untuk menentukan model terestimasi *PLS* atau *FEM*.  $H_0$  uji Chow: model terestimasi adalah *Pooled Least Squares (PLS)*, dan  $H_A$ -nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.  $H_0$  diterima jika nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $F > \alpha$ ;  $H_0$  ditolak bila nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $F \leq \alpha$ . Hasil uji Chow dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 terlihat nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $F$  sebesar 0,000 ( $< 0,01$ ), jadi  $H_0$  ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah *FEM*.

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi *FEM* atau *REM*.  $H_0$  uji



Hausman: model terestimasi adalah *Random Effect Model (REM)* dan  $H_A$ -nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.  $H_0$  diterima jika nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $\chi^2 > \alpha$ ; dan  $H_0$  ditolak bila nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $\chi^2 \leq \alpha$ . Hasil uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1, terlihat nilai  $p$  ( $p$ -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $\chi^2$  sebesar 0,0000 ( $< 0,01$ ), jadi  $H_0$  ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Dari uji Chow, uji Hausman, model *Fixed Effect Model (FEM)* terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *FEM* tersaji pada Tabel 2.

### Uji Eksistensi Model Terestimasi *FEM*

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji  $F$ . Karena dalam model terestimasi terbaik *FEM (Fixed Effect Model)* terdapat 4 variabel independen, maka formulasi hipotesisnya adalah:  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  (koefisien regresi keempat variabel nol atau model tidak eksis);  $H_A: \beta_1 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0 \vee \beta_3 \neq 0 \vee \beta_4 \neq 0$  (setidaknya terdapat satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model eksis).  $H_0$  akan diterima jika nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $F > \alpha$ ;  $H_0$  akan ditolak jika nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $F \leq \alpha$ .

Dari Tabel 2 terlihat bahwa nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $F$  bernilai 0,000 ( $< 0,01$ ); jadi  $H_0$  ditolak. Simpulan, model terestimasi *FEM* eksis.

**Tabel 2**  
**Model Estimasi *Fixed Effect Model (FEM)***

$$\begin{aligned} \widehat{TK}_{it} = & -406146,0 + 0,00000906 \text{ INV}_{it} + 07690,946 \text{ IPM}_{it} \\ & \quad \quad \quad (0,2845) \quad \quad \quad (0,1527) \\ & + 0,026952 \text{ UMK}_{it} - 0,00000224 \text{ BP}_{it} \\ & \quad \quad \quad (0,0284)** \quad \quad \quad (0,7418) \end{aligned}$$


---

$R^2 = 0,999121$ ;  $DW = 3,057386$ ;  $F = 1956,678$ ; Prob.  $F = 0,00000$

**Sumber:** Eviews. **Keterangan:** \*Signifikan pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\* Signifikan pada  $\alpha = 0,05$ ; \*\*\* Signifikan pada  $\alpha = 0,10$ ; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik  $t$ .

### Interpretasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Dari Tabel 4.2 terlihat nilai  $R^2$  pada model *Fixed Effect Model (FEM)* sebesar 0,999121 artinya 99,9% variasi variabel penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten dan Belanja Daerah. Sisanya, sebesar 0,1%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

### Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi *FEM*

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara individual atau parsial. Uji validitas pengaruh memakai uji  $t$ .  $H_0$  uji  $t$  adalah  $\beta_i = 0$ , variabel independen ke  $i$  dalam model terestimasi tidak memiliki pengaruh signifikan;  $H_A$ -nya  $\beta_i \neq 0$ : variabel independen ke  $i$  dalam model terestimasi memiliki pengaruh signifikan.  $H_0$  akan diterima jika nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $t > \alpha$ ;  $H_0$  akan ditolak jika nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik  $t \leq \alpha$ . Hasil uji



validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen**

Variabel	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
INV	0,2845	> 0,10	Tidak Signifikan
IPM	0,1527	> 0,10	Tidak Signifikan
UMK	0,0284	< 0,05	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
BP	0,7418	> 0,10	Tidak Signifikan

**Sumber:** Eviews, diolah.

### Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 3, terlihat hanya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (TK). Sementara Investasi (INV), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Pemerintah (BP) tidak memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (TK) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019-2021.

Variabel Upah Minimum Kabupaten memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,026952, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Upah Minimum Kabupaten mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,026952 jiwa. Sebaliknya, Upah Minimum Kabupaten mengalami penurunan sebesar 1 rupiah, maka penyerapan tenaga kerja akan menurun sebesar 0,026952 jiwa.

### Interpretasi Ekonomi

#### Upah Minimum Kabupaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini tidak sesuai hipotesis awal bahwa menurut teori upah efisiensi oleh Keynes menyatakan perusahaan mungkin akan membayar upah lebih dari harga pasar untuk dapat meningkatkan produktivitas pekerja tersebut sehingga kecil kemungkinan apabila tingkat upah turun karena dapat menurunkan pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat akan menyebabkan menurunnya konsumsi secara keseluruhan dan harga-harga juga menurun, hal tersebut akan berpengaruh pada nilai marginal produktivitas tenaga kerja juga akan menurun dimana menunjukkan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang ditampung (Rahmah & Juliannisa, 2022).

Salah satu penyebab yang membuat kenaikan upah sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dikarenakan adanya pengembangan produksi produk lokal yang dikonsumsi secara lokal atau jenis industri di Sumatera Utara termasuk kedalam industri *non-tradeable*, di mana produksi lokal dikonsumsi secara lokal. Dengan kata lain, industri yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara tersebut masih didominasi *non-tradeable*, sehingga mendorong terjadinya peningkatan output produksi akibat konsumsi yang meningkat sebagai dampak dari meningkatnya upah di Provinsi Sumatera Utara (Hafiz & Haryatiningsih, 2021).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Riyanto, (2022)





bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Rochman et al., (2016) dan Putri et al., (2022) juga menemukan hal yang sama bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

### **Investasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hal yang menjadi penyebab adanya ketidaksignifikan investasi dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara disebabkan karena investasi yang cenderung padat karya di Sumatera Utara tidak dapat bertahan lama disebabkan karena ada 2 hal. Yaitu, faktor karakter budaya dan faktor karakter masyarakat. Ditinjau dari karakter budaya masyarakat, masyarakat Sumatera Utara terkenal sebagai etnik yang egaliter. Mereka lebih suka bekerja mandiri dibandingkan sebagai buruh. Mereka terkenal sebagai pedagang yang sungguh-sungguh. Mereka juga lebih suka menjadi raja kecil di perusahaan kecil daripada menjadi buruh di perusahaan besar. Karena itu banyak masyarakat lebih memilih menjadi pengusaha UMKM dibandingkan menjadi buruh pabrik atau buruh bangunan (Renaldi & Nurfaahmiyati, 2022).

Hal ini juga bisa dilihat dari peluang-peluang kerja yang tersedia di Sumatera Utara setiap tahunnya. Setiap tahun sektor konstruksi dan bangunan membutuhkan ribuan tenaga kerja, namun peluang kerja yang terbuka ini umumnya tidak dilirik oleh masyarakat Sumatera Utara sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa Masyarakat Sumatera Utara lebih selektif memilih tempat mereka bekerja dan jumlah pendapatan yang akan mereka terima. Karakter masyarakat itulah yang membuat beberapa perusahaan dengan pola padat karya tidak bertahan lama di Sumatera Utara. Berbeda dengan di Jawa, perusahaan-perusahaan padat karya seperti pabrik sepatu, pabrik rokok, pabrik tekstil, dan sejenisnya bisa jalan dan bertahan lama (Renaldi & Nurfaahmiyati, 2022).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Effendi, (2019) bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Rahmawati (2019) dan Ayu (2021) juga menemukan hal yang sama bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

### **Belanja Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja dikarenakan, apabila pengeluaran pemerintah tersebut yang digunakan untuk pembangunan, pembangunan tersebut tidak lagi berjalan atau stagnan, dikarenakan tidak adanya investor. Implikasinya tidak adanya penyerapan tenaga kerja di sektor pembangunan tersebut. Contoh pembangunan bandara yang tidak maksimal maka akan menyebabkan tidaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan bandara tersebut, sehingga kesempatan kerja pun juga akan kecil.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hellen et al., (2017) bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Masa et al., (2021) dan Ziyadaturrofiqoh et al., (2018) juga menemukan hal yang sama bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

## **Indeks Pembangunan Manusia**

Hasil penelitian menemukan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Semestinya dengan nilai IPM yang terus meningkat tersebut dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Hasil yang tidak signifikan dapat terjadi akibat IPM yang tinggi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi tidak menjanjikan akan terserap di pasar tenaga kerja dikarenakan perusahaan cenderung lebih memilih tenaga kerja dengan upah yang tidak tinggi. Selain itu, juga dapat terjadi akibat tenaga kerja yang tidak memiliki kualitas yang memadai tidak terserap dengan baik di pasar tenaga kerja (Anzari, 2022).

Selain itu, tingginya Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki sumber daya manusia belum tentu menjamin terserapnya tenaga kerja secara maksimal, karena Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi belum tentu sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh penyedia lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang tersedia tidak dapat mengisi kesempatan yang ada. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Ibiyantoro, 2022).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prawoto (2018) bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Shafira (2020) dan (Bella, 2018) juga menemukan hal yang sama bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Model terestimasi *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai hasil estimasi terbaik. Variabel Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Sementara, Indeks Pembangunan Manusia, Investasi dan Belanja Pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dengan melihat besarnya pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap penyerapan tenaga kerja, diharapkan pemerintah dapat menjadikan penetapan Upah Minimum Kabupaten sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun, kenaikan upah minimum sering diartikan sebagai kenaikan upah yang besar, sehingga terkesan upah minimum digunakan sebagai penentu upah, bukan sebagai cara pengaman sosial kaum berpendapatan rendah. Sehingga, harus ada upaya pemerintah dalam penegakan aturan penetapan upah minimum yang telah berlaku pada perusahaan untuk melindungi penghasilan masyarakat yang rendah.

Untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain yang lebih kompleks dan terukur dalam menjelaskan faktor-faktor penyerapan tenaga kerja, mengingat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih belum sepenuhnya mampu menjelaskan faktor-faktor penyerapan tenaga kerja di suatu daerah yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat analisis yang kompleks dan sistematis dalam menjelaskan faktor-faktor penyerapan tenaga kerja di suatu daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Aisyah, S & Fitriana, W. (2019). Determinasi Pembangunan Manusia dan Investasi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja. *The 9th University Research colloquium (Urecol)*. 9(3).
- Aisyah, S & Nur, I. P. (2020). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta. *The 10 Research colloquium (Urecol)*. 10(1).
- Ali, G., Koleangan, R. A. M., & Siwu, H. F. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20 (01), 1-10.
- Alisman. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal REP*, 3(2), 322-333. DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v3i2.1040>
- Anzari, D. A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2020. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Ayu, B. R. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Upah Minimum Provinsi Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2019. *Skripsi*. Universitas Jambi.
- Basriwijaya, K. M. Z & Maryoni, H. S. (2015). Pengaruh Investasi, Inflasi, Suku Bunga dan Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(2), 89-96.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indonesia dalam Angka 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bella, S. A. (2018). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2010–2016). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Dartanto, T. (2020). *IPM, Harapan dan Tantangan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Disnakertras Sumut. (2020). Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara selama Pandemi Covid 19. *Online*, diakses tanggal 2 Desember 2022. <https://disnaker.sumutprov.go.id/artikel/kondisi-ketenagakerjaan-provinsi-sumatera-utara-selama-pandemi-covid-19>.
- Hafiz, E. A. & Haryatiningsih, R. (2021). Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. *Journal Riset Ilmu Ekonomi*. 1(1), 55-65. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.174>
- Hasani, M. N. (2022). Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. 8(2), 329-344.
- Hellen, H., Mintarti, S & Fitriadi, F. (2017). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja. *INOVASI*, 13(1), 28-38.
- Hidayat, A. S & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *JEPE: Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 1(1).
- Ibiyantoro, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbukadi Provinsi Maluku. *Skripsi*. Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Istiyani, N., Viphindartin, S., Nurhardjo, B., & Restiawan, A. I. (2022). Analisis PDRB, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 121-128.
- Lastiko, R. R. (2019). Pengaruh Tingkat Upah, Volume Penjualan, Lama Usaha, Pendidikan,

- dan Modal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Studi Kasus Sentra Industri Kulit Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 7(2).
- Makhroji, D. & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Qu*, 9(1), 52-72.
- Maulidina, M. A. (2018). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1-10.
- Masa, R., Wijaya, A & Gani, I. (2021). Pengaruh Investasi dan Belanja Langsung serta Belanja tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. *INOVASI*. 17(2), 311-319.
- Ningrum, M & Nurhayati, S. F. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Provinsi Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*. 1(1).
- Nofrita, C & Marwan. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Salingka Nagari*, 01(2), 179-187. DOI: <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i2.33>
- Palupy, Y. R & Purnomo, D. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi. Ekonomi Pembangunan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prawoto, D. A. (2018). Pengaruh Ipm, Upah Minimum, Pdrb Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Putri, E., Setyowati, E & Rosyadi, I. (2022). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), dan Indeks Perkembangan Manusia (IPM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.594>
- Putri, N. A & Soelistyo, A. (2018). Analisis Pengaruh Upah, PDRB dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di kawasan Gerbang Kertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 357-371.
- Purwaningsih, Y. (2017). *Ekonomi Pertanian*. Surakarta: UNS Press.
- Rahmah, A. M & Juliannisa, J. A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupate/Kota Provinsi Jawa Barat. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(3), 246-254.
- Rahmi, J & Riyanto, R. (2022). Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 1-12.
- Ramlawati. (2020). Peranan Sektor Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. 1(2), 173-193. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>
- Rahmawati, I. (2019). Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Renaldi, W & Nurfahmiyati. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumbar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIB)*. 2(1).
- Rochman, T. S & Purwaningsih, Y., & Suryantoro, A. (2016). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 16(2).



- Romdhoni, A. H. (2017). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 03(02), 139-151. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i02.107>
- Safitri, L & Effendi, M. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk dan Investasi terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*. 2(4), 842-851.
- Shafira, A. (2020). Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Saputri, S. H. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran (Studi Kasus 11 Provinsi di Indonesia Periode 2006-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 5(1).
- Tasmilah. (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2), 92-112.
- Todaro, M. P & Smith, S. C. (2015). *Economic development 12th Edition*. United States of America: Pearson.
- Wasilaputri, F. R. (2016). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 5(3), 243-250.
- Ziyadaturrofiqoh, Z., Zulfanetti, Z., & Safrie, M. (2018). Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 7(1).



**Alfandiary Raihan Nurichsan, dkk.** Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

